

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

*Ahmad Dzulfikardin*

*NPP.30.1329*

*Asdaf Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

*Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. Anselmus Tan, M.Pd*

## **ABSTRACT**

**Problem Statement/background(GAP):** *The problem of street children is a problem that has become a problem in every region, including in Kolaka Regency. The problems that are present actually appear to children in the underage age group who have to feel how hard it is to live on the streets. Busking, begging, selling, to criminal acts they do in order to survive.*

**Purpose:** *This study aims to find out the role of the Social Service in fostering street children in Kolaka Regency, what programs are in fostering street children and to find out the supporting and inhibiting factors of the city government in handling street children in Kolaka Regency.*

**Method:** *This type of research is descriptive qualitative in nature to describe and explain the role of the Social Service in fostering street children in Kolaka district. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation techniques.*

**Result:** *The results of this study are that the guidance of street children is carried out by collecting data on street children every year, providing conditional social assistance such as the Family Hope Program (PKH) and giving Smart Indonesia Cards (KIP). As well as conducting cooperation from the community and other institutions in the form of Child Social Welfare Institutions (LKSA).*

**Conclusion:** *the conclusion obtained from the results of the research that the Street Children Development in Kolaka Regency has been implemented properly. Judging from the 4 implementation factors, the resource factor is considered not good enough to support the implementation of fostering street children in Kolaka Regency. The researcher proposes a suggestion that the Social Service can cooperate with NGOs in terms of assisting with funding for the process of fostering street children, and can become a sponsor for the Child Welfare Institution which has assisted the Social Service in terms of fostering street children in Kolaka Regency.*

**Keywords:** *Poverty, Street Children, Development, Social Service*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang(GAP):**Permasalahan anak jalanan merupakan masalah yang sudah menjadi permasalahan di setiap daerah termasuk di Kabupaten Kolaka. Permasalahan yang hadir sebenarnya muncul pada anak-anak dalam kelompok usia di bawah umur yang harus merasakan bagaimana kerasnya hidup di jalanan. Mengamen, mengemis, berjualan, hingga tindak kriminal mereka lakukan demi bertahan hidup.**Tujuan:**Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pembinaan Anak Jalanan di Kabupaten Kolaka, apa program dalam pembinaan anak jalanan tersebut serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah kota dalam penanganan anak jalanan di Kabupaten Kolaka. **Metode:** Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kabupaten Kolaka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:**Hasil Penelitian ini adalah pembinaan anak jalanan dilakukan dengan pendataan anak jalanan setiap tahunnya, pemberian bantuan sosial bersyarat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Serta melakukan Kerjasama dari masyarakat dan lembaga lain berupa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). **Kesimpulan:** kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian bahwa Pembinaan Anak Jalanan di Kabupaten Kolaka telah dilaksanakan dengan baik. Dilihat dari 4 faktor implementasi, faktor sumberdaya yang dinilai masih kurang baik dalam mendukung implementasi pembinaan anak jalanan di Kabupaten Kolaka. Peneliti mengajukan saran Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan LSM dalam hal membantu pendanaan terhadap proses pembinaan anak jalanan, serta dapat menjadi sponsor kepada pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang telah membantu Dinas Sosial dalam hal pembinaan anak jalanan di Kabupaten Kolaka.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Anak Jalanan, Pembinaan, Dinas Sosial.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Jumlah penduduk Indonesia meningkat setiap tahun. Berdasarkan data proyeksi penduduk interim 2020-2023 oleh Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2021 sebesar 272,68 juta jiwa (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022). Hal ini berarti meningkat 34,16 juta jiwa dibandingkan dengan hasil sensus penduduk pada tahun 2010. Laju pertumbuhan penduduknya 1,22 persen per tahun. Dengan luas daratan Indonesia 1,9 juta km<sup>2</sup> sehingga kepadatan penduduknya sebanyak 142 jiwa per km<sup>2</sup>.

Peningkatan jumlah penduduk tiap tahun juga meningkat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 sebesar 2,65 juta jiwa (Sumber: Badan Pusat Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022). Selain jumlah penduduk laju pertumbuhan penduduk pertahun dan tingkat kepadatan penduduk juga meningkat.

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, menjadi dasar perlindungan sosial terhadap masyarakat kecil. Dimana peran perlindungan sosial dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP kabupaten Kolaka berperan dalam melaksanakan razia dan penertiban terhadap anak jalanan yang berada di Kabupaten Kolaka. Selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka untuk melaksanakan pembinaan. Dinas Sosial kabupaten kolaka selaku Instansi terkait menjalankan tugas yang berkaitan dengan pembiayaan berupa bantuan sosial. Kendati demikian berdasarkan pengamatan penulis, masih sangat mudah untuk menemukan anak-anak di sisi jalan dan di beberapa titik di Kabupaten Kolaka.

**Tabel 1.2**  
**Data Anak Jalanan Kabupaten Kolaka 2018-2021**



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kolaka

Berdasarkan grafik di atas jumlah anak jalanan yang berkeliaran di Kabupaten Kolaka meningkat dari tahun 2018- 2021, yang tersebar di beberapa titik Kota seperti di perempatan lampu lalu lintas, taman kota, pantai, pasar, dan beberapa tempat umum lainnya di Kabupaten Kolaka.

Berdasarkan grafik di atas dan informasi yang ada dan telah dikemukakan oleh penulis di atas, dapat penulis simpulkan bahwa penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka belum maksimal dan belum efektif. Maka atas dasar tersebut penulis tertarik meneliti lebih dalam tentang bagaimana **“Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara”**

## 1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Peningkatan jumlah penduduk tiap tahun meningkat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 sebesar 2,65 juta jiwa (Sumber: Badan Pusat Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022). Selain jumlah penduduk laju pertumbuhan penduduk pertahun dan tingkat kepadatan penduduk juga meningkat.

Kabupaten Kolaka merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan jumlah

penduduk menyebabkan permasalahan sosial yang harus segera ditangani seperti terbatasnya lapangan pekerjaan.

Tingginya jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan sehingga mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan lain di masyarakat, diantaranya menurunnya indeks kesehatan dan pendidikan masyarakat karena tidak memiliki biaya serta tindak kriminalitas semakin besar karena tuntutan ekonomi. Kondisi lapangan pekerjaan di Kabupaten Kolaka yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Selain itu rendahnya kualitas sumber daya manusia juga menyebabkan munculnya pengangguran.

Guna memenuhi kebutuhannya serta membantu keuangan keluarganya banyak masyarakat yang mencari lapangan pekerjaan sektor informal misalnya mengemis dan mengamen. Di Kabupaten Kolaka fenomena anak jalanan seperti gelandangan, pengemis, dan pengamen banyak dijumpai di tempat-tempat umum dan keramaian diantaranya di perempatan lampu lalu lintas dan pasar serta fasilitas umum lainnya. Anak jalanan di Kabupaten Kolaka banyak yang putus sekolah dan menjadi gelandangan, pengemis dan juga pengamen.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Hasil dari penelitian sebelumnya di butuhkan oleh penulis sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian dan sebagai alat untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta data terkait penelitian yang dilakukan.

Penelitian terdahulu kemudian dianalisis dan di lihat pokok permasalahannya sehingga dapat di ketahui letak kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan. Berikut ini hasil dari salah satu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

- Penelitian oleh Besse Erniati (2019) mengenai pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar. Terdapat kesamaan dengan penelitian ini dalam menggunakan metode kualitatif dan mengkaji pembinaan anak jalanan. Namun, terdapat perbedaan dalam tahun dan lokasi penelitian.
- Penelitian oleh Abdul Syaban, La Iru, Arsidik Asuru (2019) juga mengkaji fenomena anak jalanan dengan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada tahun dan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian ini.
- Laporan akhir oleh Hasan Putra Takala (2021) membahas upaya Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan di Kota Kendari. Terdapat perbedaan dalam lokasi, tahun, dan pendekatan teoritis yang digunakan.

Penelitian sebelumnya memberikan wawasan dan pemahaman mengenai masalah pembinaan anak jalanan, namun penelitian ini tetap memiliki ciri khasnya sendiri dengan fokus pada Kabupaten Kolaka, tahun 2023, dan pendekatan teori implementasi.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Implementasi, dengan demikian maka secara umum dimensi penelitian serta sub dimensi yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian juga berbeda pula. Selanjutnya metode penelitian

yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif, yaitu melihat kenyataan yang terjadi di lapangan.

## **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi dan menganalisis implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kabupaten Kolaka, mendeskripsi dan menganalisis faktor penghambat implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kabupaten Kolaka serta mendeskripsikan dan menganalisis upaya mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kabupaten Kolaka.

## **II. METODE**

Melihat kondisi dan situasi di Kabupaten Kolaka yang beragam maka penulis memutuskan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mengkaji unsur-unsur yang saling terkait kemudian mendeskripsikannya dan mengungkap fenomena secara kontekstual melalui pengumpulan data. Alasan penulis menggunakan metode kualitatif karena permasalahan masih sangat beragam sehingga dalam identifikasinya masih memerlukan pendalaman yang lebih lanjut.

Penulis menyimpulkan bahwa dengan menggunakan teknik purposive sampling dalam pemilihan informan maka informan yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini merupakan orang-orang yang memiliki kepentingan, memegang jabatan yang berkaitan, maupun badan dan organisasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Termasuk dalam penelitian ini maka yang menjadi informan adalah unsur yang terlibat dalam pembinaan anak jalanan diantaranya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi, orang tua anak jalanan, juga pengguna jalan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pembinaan Anak Jalanan Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Kolaka**

Berbicara mengenai implementasi kebijakan Pembinaan Anak Jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka, maka tidak terlepas dari dimensi-dimensi yang mempengaruhinya diantaranya dimensi komunikasi, dimensi sumber daya, dimensi disposisi, dan dimensi struktur birokrasi. Berikut penulis uraikan dimensi-dimensi tersebut berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan:

- **Dimensi Komunikasi**

Komunikasi yang dimaksud dalam proses pembinaan anak jalanan adalah proses penyampaian informasi kepada anak jalanan dan orang tua anak jalanan (sosialisasi) mengenai apa saja yang berkaitan dengan proses pembinaan yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu anak jalanan dan orang tua anak jalanan guna memperbaiki kehidupannya sehingga tidak perlu lagi menjadi pengamen, pedagang asongan, maupun

pengemis. Indikator yang dapat mengukur dimensi komunikasi dapat berjalan dengan baik adalah transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

- **Dimensi Sumberdaya**

Sumberdaya merupakan salah satu unsur penting berhasilnya pelaksanaan suatu kebijakan. Begitu pula dengan pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan di Kabupaten Kolaka, membutuhkan sumberdaya yang mendukung jalannya kebijakan tersebut. Sumberdaya yang dimaksud terdapat diantaranya adalah anggaran, sumber daya manusia (SDM), sertasarana dan prasarana.

- **Dimensi Disposisi**

Dimensi disposisi atau karakter dan perilaku kebijakan akan terlihat jelas oleh masyarakat yang bersentuhan langsung dan merasakan kebijakan yang dikeluarkan. Berkenaan dengan Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, orang tua anak jalanan termasuk anak jalanan itu sendiri dapat dijadikan subjek yang pas untuk menilai bagaimana kinerja, pendekatan, dan usaha-usaha dinas sosial dalam hal menjalankan tugasnya tersebut.

Ibu Anti adalah orang tua dari Dandi, anak berusia 8 tahun yang menghabiskan hampir seluruh waktunya di jalanan, beliau merupakan salah satu narasumber dari penelitian yang dilakukan penulis. Beliau menjelaskan bahwa memang sudah pernah mendapatkan arahan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kolaka, juga pernah mendapatkan bantuan sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Kolaka. Selain itu beliau juga pernah diarahkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Kolaka. Selain ibu Anti penulis juga bertemu dengan Ahmad Dandi remaja berusia 15 tahun yang sehari-hari berjualan di perempatan jalan lalu lintas. Penulis menemukan Dandi sedang menjual di lampu merah.

- **Dimensi Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi berarti berbicara mengenai tatanan birokrasi dalam hal ini yang dimaksud adalah panjang pendeknya susunan suatu organisasi. Dikatakan mempengaruhi kebijakan karena apabila struktur yang dimiliki organisasi tersebut panjang maka tentu saja proses pelaksanaan kebijakan juga membutuhkan waktu yang panjang begitu pula sebaliknya. Selain itu juga struktur birokrasi menyinggung tentang kejelasan SOP pelaksanaan kebijakan, serta Fragmentasi/ pembagian tugas kerja. Guna memperjelas beberapa indikator Struktur Birokrasi di atas berikut penulis urai kan dengan seksama.

Standar Operasional Prosedur yang dimiliki Dinas Sosial berkenaan dengan kebijakan pembinaan anak jalanan sudah ada didalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kolaka. Jelas diterangkan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Pasal 18 ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, pemantauan dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial. Mengenai fungsi bidang rehabilitasi sosial dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 19.

Banyak sekali faktor penghambat yang disampaikan pihak Dinas Sosial dalam hal Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan Di Kabupaten Kolaka, yang salah satunya yaitu mengenai anggaran. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka sendiri menyampaikan bahwa dana yang disediakan untuk Bidang Rehabilitasi Sosial belum mencukupi karena dana juga diperlukan dan dibagi kepada bidang lain yang memiliki banyak permasalahan sosial yang harus segera ditangani. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa dasar penyelenggaraan suatu kebijakan adalah anggaran.

Anggaran sangat mempengaruhi proses serta hasil dari pelaksanaan suatu kebijakan. Mengapa demikian, karena segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu kebijakan itu membutuhkannya begitu pula dengan kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Kabupaten Kolaka yang tentu saja membutuhkan dana yang banyak.

Menghadapi banyaknya hambatan yang ditemukan Dinas Sosial Kabupaten Kolaka dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak jalanan tidak membuat Dinas Sosial Kabupaten Kolaka diam saja. Dinas Sosial Kabupaten Kolaka tetap berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugasnya tersebut, dimana salah satu usahanya yaitu tetap menjalankan pendataan anak jalanan pada bulan Februari setiap tahunnya.

Kegiatan ini bekerja sama dengan pihak Satpol PP dalam proses razia. Pendataan ini merupakan salah satu langkah dasar dan penting dalam proses pembinaan anak jalanan di Kabupaten Kolaka, karena dengan adanya data ini menjadi dasar pemberian anggaran sehingga Dinas Sosial dapat menjalankan proses pembinaan selanjutnya. Bagi Anak jalanan yang bukan penduduk asli Kabupaten Kolaka, Dinas Sosial Kabupaten Kolaka tetap melakukan pendataan kemudian akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada kepala wilayah tempat anak jalanan tersebut berasal.

### **3.2 Hambatan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan Di Kabupaten Kolaka**

Pihak Dinas Sosial Kabupaten Kolaka menghadapi beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan. Salah satunya adalah masalah anggaran yang terbatas. Dana yang disediakan untuk Bidang Rehabilitasi Sosial belum mencukupi karena juga harus dialokasikan ke bidang lain yang memiliki permasalahan sosial yang mendesak.

Hal ini mempengaruhi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pembinaan anak jalanan. Selain itu, masalah domisili anak jalanan juga menjadi kendala, di mana banyak dari mereka merupakan pendatang yang mencari penghidupan di Kabupaten Kolaka. Beberapa anak jalanan tidak ingin dibina dan lebih memilih meminta-minta karena merasa nyaman dengan keuntungannya. Respon masyarakat yang merasa iba juga sering dimanfaatkan oleh anak jalanan, sehingga mereka cenderung melarikan diri. Hal ini membuat proses pendataan dan pembinaan anak jalanan menjadi sulit dilaksanakan dengan maksimal.

### **3.3 Upaya Yang Di Lakukan Dalam Menangani Hambatan Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kabupaten Kolaka**

Dalam upaya pembinaan anak jalanan di Kabupaten Kolaka, Dinas Sosial menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan anggaran dan masalah domisili anak jalanan. Meskipun demikian, Dinas Sosial tetap berusaha semaksimal mungkin dengan melakukan pendataan anak jalanan setiap bulan Februari dengan kerjasama Satpol PP dalam proses razia. Pendataan ini menjadi dasar pemberian anggaran untuk melanjutkan proses pembinaan anak jalanan. Selain itu, Dinas Sosial juga memberikan bimbingan dan arahan kepada orang tua anak jalanan yang terkena razia, dengan tujuan agar mereka tidak lagi membiarkan anak-anak mereka berkeliaran di jalanan.

Dinas Sosial juga memberikan bantuan sosial kepada keluarga anak jalanan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lainnya seperti bantuan modal usaha. Selain itu, Dinas Sosial juga memfasilitasi pembuatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk mendukung pendidikan dan kesehatan anak jalanan. Melalui kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Dinas Sosial Kabupaten Kolaka dapat memberikan pelayanan kesejahteraan kepada anak terlantar dengan penyantunan dan penggantian peran orang tua/wali. Meskipun tantangan masih ada, Dinas Sosial berharap dapat memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak jalanan dan mengurangi jumlah anak jalanan melalui perbaikan kesejahteraan keluarga dan kerjasama dengan lembaga terkait.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penulis menemukan bahwa keberhasilan Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sama halnya dengan temuan Besse Erniati bahwa adanya Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial yaitu kurangnya tempat alokasi yang bisa menampung anak jalanan untuk melakukan pembinaan mempengaruhi proses pembinaan yang akan dilakukan (Besse, 2019). Layaknya implementasi kebijakan lainnya, pembinaan anak jalanan ini juga masih memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah Terbatasnya sumberdaya, kurangnya sarana, prasarana, partisipasi serta kesadaran masyarakat, layaknya temuan Abdul Syaban dkk (Abdul Syaban, dkk, 2019). Implementasi kebijakan belum mampu diterapkan secara maksimal karena tujuan kebijakan ini belum bisa tercapai. Faktor lain yang mempengaruhi maksimalnya suatu implementasi kebijakan adalah sumberdaya manusia. Jika sumberdaya manusia memiliki kualitas dan kuantitas yang baik maka implementasi kebijakan juga akan efektif. Namun jika dari segi sumberdaya manusia dan finansialnya Dinas Sosial masih mengalami kekurangan maka pelaksanaan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen ini dipastikan belum berjalan secara maksimal.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Kolaka memang sudah melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin untuk menanggulangi permasalahan anak jalanan yang ada di Kabupaten Kolaka. Walaupun masih ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, baik itu dalam hal anggaran ataupun dalam hal sumber daya manusianya. Solusi yang tepat dan cepat dari Dinas Sosial Kabupaten Kolaka

termasuk unsur lain dari Pemerintah Daerah memang sangat dibutuhkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Dinas saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program pembinaan anak jalanan, di Kabupaten Kolaka untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima kasih ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam hal ini telah bersedia menjadi lokasi penelitian penulis, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Erniati, B. 2019. *Implementasi Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar* [Skripsi]. Makassar (ID): Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Syahban, A, Iru, L, Arsidik, A. 2019. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dibidang Pendidikan Nonformal Pada Anak Jalanan Di Kota Kendari”. *Selami Ips Vol.12(2)*. Kendari: Universitas Haluoleo.
- Takala, H, P. 2021. *Upaya Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara* [LA]. Jatinangor (ID): Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Badan Statistik Sulawesi Tenggara. *Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara Menurut Desa/Kota Bulan Maret – September 2021*. Diakses pada tanggal 25 September 2022. <https://sultra.bps.go.id/indicator/23/401/1/jumlah-penduduk-miskin-di-sulawesi-tenggara-menurut-desa-kota.html>
- Badan Statistik Kabupaten Kolaka. *Tingkat Garis Kemiskinan di Kabupaten Kolaka 2016-2021*. Diakses pada tanggal 25 September 2022. URL <https://kolakakab.bps.go.id/indicator/23/828/1/tingkat-garis-kemiskinan.html>